

**Tahun  
Anggaran  
2024**



**RENCANA KERJA  
(RENJA)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA**





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wata A'la, atas ijin dan perlindunganNya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024 ini merupakan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis ( Renstra ) yang disusun selama 5 ( lima ) tahun, dimana sebagai upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kerja dinas Pekerjaan Umum tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap agar Rancangan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan sebagai panduan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kutai Kartanegara, 29 Juni 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,



**WISNUWARDHANA, ST.,MT**  
NIP. 19711024 200012 1 001



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJADINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2022 .....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 Dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD/SKPD.....	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD/SKPD.....	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dan RENSTRA Pada Tahun 2024.....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	66
3.1 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum .....	66
3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan RENJA OPD .....	70
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	70
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	86
BAB V PENUTUP .....	96
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja .....	96
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	99
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	100



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dengan ditetapkannya UU. No. 17 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonomi diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan dalam periode 25 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 tahunan, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sebagai Rencana tahunan dimana ketiga dokumen tersebut dilaksanakan oleh masing-masing OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara; salah satunya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.



Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun dokumen Rencana Strategis (RENTRA)-nya. Dokumen Tersebut Memuat Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum yang diikuti dengan menyusun sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan, indikator kinerja dan indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2022-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Berikutnya.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum telah menyusun Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum yang telah diselaraskan dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari hasil forum OPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan menjadi Rancangan Akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024.

Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pembahasan terhadap dokumen tersebut oleh tim verifikasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembahasannya mencakup :

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan
2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD Kabupaten Kutai



Kartanegara dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024 merupakan penjabaran program / kegiatan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 serta berpedoman pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim 2024. Dengan demikian program/kegiatannya diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

## **1.2. Landasan Hukum.**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
2. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana



- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan



Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
12. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD/SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 18 Tahun 2016 tentang Penyusunan, Pengendalian, & Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 22 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;



Pengembangan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum disusun dengan pendekatan sistem manajemen strategis (strategik management system), dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 17 tahun 2007. Undang-undang tersebut menjadi salah satu pendekatan yang cukup penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergitas program antara Pusat dengan Daerah, maupun pengembangan program pembangunan lintas sektor yang diselenggarakan di Daerah. Implementasi Undang-undang No. 17 tahun 2007 tersebut dapat dipandang sebagai instrumen efektif dalam rangka pelembagaan kegiatan perencanaan yang partisipatif.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Secara rinci maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjadi panduan bagi organisasi Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada dinas.
2. Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dinas.



Tujuan dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Acuan Dinas Pekerjaan Umum dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2024.
3. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang memadai di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Menciptakan kemudahan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi, dalam rangka meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.
5. Mensinergikan dan mensikronisasikan program-program nasional, provinsi dan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, landasan hukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum.



2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD/SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD/SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2024 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA OPD/SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD/SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA OPD/SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD/SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD/SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing OPD/SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD/SKPD

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD/SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD/SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD/SKPD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

Dimaksudkan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara agar



pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu tidak terulang kembali pada tahun anggaran yang berjalan saat ini.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD/SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD/SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD/SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

### Bab III : Tujuan, Sasaran, dan Program Kegiatan Tahun 2024

#### 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang berhubungan langsung dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD/SKPD

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA OPD/SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD/SKPD agar dapat dicapai.

### Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

#### 4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan



kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

**Bab V : Penutup**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut





## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2022**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 Dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum**

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun 2022, disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran, ada yang sampai tingkat output dan adapula yang sampai pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar **Rp. 787.715.596.164,00 ( Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam RibuSeratus Enam Puluh Empat Rupiah )** dengan rincian disajikan pada tabel 1.



**Tabel 1.  
Jumlah APBD-P Tahun Anggaran 2022 yang dikelola  
Dinas Pekerjaan Umum**

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
1	<b>BELANJA DAERAH</b>	
1.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	156.221.365.745,00
	Belanja Pegawai	38.959.065.097,00
	Belanja Barang dan Jasa	117.262.300.648,00
1.2	<b>BELANJA MODAL</b>	631.494.230.419,00
	Belanja Modal Tanah	24.170.690.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.390.227.955,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.980.950.446,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	525.939.042.018,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.320.000,00
	<b>JUMLAH TOTAL ANGGARAN</b>	<b>787.715.596.164,00</b>

*Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan*

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat 7 Program dan 17 kegiatan didalamnya. Nilai rata-rata persentase untuk seluruh pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2022 adalah 85,03%, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut :



**Tabel 2.  
Rekap Capaian Keluaran Akumulatif Tahun Anggaran 2022**

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI FISIK (%)</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>68,747,081,051.00</b>	<b>100</b>
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	475,201,000.00	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59,083,276,240.00	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	362,516,216.00	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	1,000,000,000.00	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,808,803,595.00	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	842,780,000.00	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,239,504,000.00	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	935,000,000.00	100
<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	<b>2,698,302,004.00</b>	<b>61,66</b>
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1,698,302,004.00	82,67
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah kabupaten/Kota	800,000,000.00	100
Pengawasan tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	200,000,000.00	85
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	<b>14,035,006,786.00</b>	<b>100</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Kabupaten/Kota	14,035,006,786.00	100
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	<b>128,218,884,000.00</b>	<b>33,56</b>
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	87,834,880,000.00	60,68



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,384,004,000.00	6,45
<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>8,713,127,689.00</b>	<b>100</b>
Penyelenggaraan Bangunan di Wilayah daerah kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan Gedung	8,713,127,689.00	100
<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	<b>100,613,926,172.00</b>	<b>100</b>
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di daerah Kabupaten/kota	100,613,926,172.00	100
<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>464,689,268,462.00</b>	<b>100</b>
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	464,689,268,462.00	100
<b>Total</b>	<b>787,715,596,164.00</b>	

Adapun kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Rencana tidak sesuai dengan keluaran yg diharapkan
  - Keterlambatan dalam penerbitan SK
  - Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
  - Waktu pengajuan pembayaran oleh pihak rekanan maupun PPTK tidak sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
  - Pelaksanaan terkendala regulasi, rencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  - Harga barang melebihi pagu
  - Pelaksanaan terkendala regulasi
  - Lokasi Terkendala Kondisi Alam
  - Salah dalam penyusunan alokasi anggaran
  - Waktu pelaksanaan kurang
  - Material sulit ditemukan di pasar



- Waktu pengajuan pembayaran oleh pihak rekanan maupun PPTK tidak sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Pelaksanaan terkendala regulasi
  - Penerima manfaat bertambah/berkurang
  - Lokasi bertambah/berkurang
  - Waktu pengajuan pembayaran oleh pihak rekanan maupun PPTK tidak sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,
  - Rencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan
  - Lokasi Terkendala Kondisi Alam
  - Material sulit ditemukan di pasar
  - Pelaksanaan terkendala regulasi
  - Waktu pelaksanaan kurang
  - Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
  - Waktu pengajuan pembayaran oleh pihak rekanan maupun PPTK tidak sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
5. Program Penyelenggaraan Jalan
- Anggaran Kurang Terhadap Target Output
  - Pelaksanaan terkendala regulasi
  - Material sulit ditemukan di pasar
  - Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
  - Lokasi bertambah/berkurang
  - Salah Dalam Penyusunan Alokasi
  - Lokasi Terkendala Kondisi Alam
  - Waktu pengajuan pembayaran oleh pihak rekanan maupun PPTK tidak sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
  - Gagal Lelang



Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp. **787.715.596.164,00** ( **Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah** ) dan realisasi anggaran sebesar Rp. **654.082.095.006,00** ( **Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Rupiah** ) atau sebesar **83,04 %**, rincian dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3.**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022**

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>68,747,081,051.00</b>	<b>59,831,303,039.00</b>	<b>87.03</b>	<b>8,915,778,012.00</b>
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	475,201,000.00	168,945,930.00	35.55	306,255,070.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59,083,276,240.00	52,057,187,457.00	88.11	7,026,088,783.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	362,516,216.00	324,075,500.00	89.40	38,440,716.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	1,000,000,000.00	784,247,000.00	78.42	215,753,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,808,803,595.00	2,177,804,869.00	77.53	630,998,726.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	842,780,000.00	842,100,000.00	99.92	680,000.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,239,504,000.00	2,887,547,303.00	89.14	351,956,697.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	935,000,000.00	589,394,980.00	63.04	345,605,020.00
<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	<b>2,698,302,004.00</b>	<b>1,684,808,566.00</b>	<b>62.44</b>	<b>1,013,493,438.00</b>
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1,698,302,004.00	931,359,566.00	54.84	766,942,438.00



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah kabupaten/Kota	800,000,000.00	709,627,000.00	88.70	90,373,000.00
Pengawasan tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	200,000,000.00	43,822,000.00	21.91	156,178,000.00
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	<b>14,035,006,786.00</b>	<b>12,142,706,258.00</b>	<b>86.52</b>	<b>1,892,300,528.00</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Kabupaten/Kota	14,035,006,786.00	12,142,706,258.00	86.52	1,892,300,528.00
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	<b>128,218,884,000.00</b>	<b>91,033,745,271.00</b>	<b>71.00</b>	<b>37,185,138,729.00</b>
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	87,834,880,000.00	60,478,846,933.00	68.86	27,356,033,067.00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Skunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,384,004,000.00	30,554,898,338.00	75.66	9,829,105,662.00
<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>8,713,127,689.00</b>	<b>5,836,743,545.00</b>	<b>66.99</b>	<b>2,876,384,144.00</b>
Penyelenggaraan Bangunan di Wilayah daerah kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan Gedung	8,713,127,689.00	5,836,743,545.00	66.99	2,876,384,144.00
<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	<b>100,613,926,172.00</b>	<b>86,424,371,837.00</b>	<b>5.90</b>	<b>14,189,554,335.00</b>
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di daerah Kabupaten/kota	100,613,926,172.00	86,424,371,837.00	85.90	14,189,554,335.00
<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>464,689,268,462.00</b>	<b>397,128,416,490.00</b>	<b>85.46</b>	<b>67,560,851,972.00</b>
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	464,689,268,462.00	397,128,416,490.00	85.46	67,560,851,972.00
<b>Total</b>	<b>787,715,596,164.00</b>	<b>654,082,095,006.00</b>	<b>83.04</b>	<b>133,633,501,158.00</b>



Sedangkan pada tahun sebelumnya (2021) realisasi anggaran sebesar 87,48%, rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 4. Dengan demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 4,44% hal ini disebabkan karena kurang optimalnya serapan anggaran dikarenakan adanya penumpukan penagihan pada akhir tahun sehingga berpotensi menjadi utang.

**Tabel 4  
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Tahun Sebelumnya (2021)**

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase Realisasi (%)</b>	<b>Sisa Anggaran (Rp)</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>179.501.630.004,00</b>	<b>173.084.922.249,00</b>	<b>96,43</b>	<b>6.416.707.755,00</b>
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.000.000,00	36.920.000,00	36,92	63.080.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	174.149.464.416,00	169.065.511.088,00	97,08	5.083.953.328,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	222.455.000,00	120.414.900,00	54,13	102.040.100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	177.861.000,00	31.570.000,00	17,75	146.291.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	889.253.100,00	527.496.144,00	59,32	361.756.956,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.868.556.488,00	2.513.225.970,00	87,61	355.330.518,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.094.040.000,00	789.784.147,00	72,19	304.255.853,00
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>415.032.000,00</b>	<b>98,82</b>	<b>4.968.000,00</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Kabupaten/Kota	420.000.000,00	415.032.000,00	98,82	4.968.000,00
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	<b>33.964.563.884,00</b>	<b>25.496.692.388,00</b>	<b>75,07</b>	<b>8.467.871.496,00</b>



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	18.580.341.973,00	14.992.140.013,00	80,69	3.588.201.960,00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Skunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.384.221.911,00	10.504.552.375,00	68,28	4.879.669.536,00
<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	<b>98.202.787.928,00</b>	<b>91.838.294.881,00</b>	<b>93,52</b>	<b>6.364.493.047,00</b>
Penyelenggaraan Pentaan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	98.202.787.928,00	91.838.294.881,00	93,52	6.364.493.047,00
<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>240.265.675.290,00</b>	<b>192.341.108.740,00</b>	<b>80,05</b>	<b>47.924.566.550,00</b>
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	240.265.675.290,00	192.341.108.740,00	80,05	47.924.566.550,00
<b>Total</b>	<b>552.354.657.106,00</b>	<b>483.176.050.258,00</b>	<b>87,48</b>	<b>69.178.606.848,00</b>

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka perlu peningkatan koordinasi lintas OPD/SKPD terkait untuk mempersiapkan secara matang kerangka pelaksanaan dimulakan dari kegiatan perencanaan hingga terlaksananya kegiatan pelaksanaan fisik agar tujuan dan arah pembangunan yang telah terukur dapat dicapai sebagaimana yang dikehendaki.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam pengaturan, pembinaan, pelayanan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan PSPU (prasarana dan sarana pekerjaan Umum).



- strategi yang digunakan dengan meningkatkan kualitas/kwantitas SDM melalui bimtek/diklat dan sarana (menambah peralatan / perlengkapan) kantor.
- 2. Melakukan penataan pembangunan gedung negara dan bangunan umum. strategi ditetapkan dengan cara
  - Mewujudkan pembangunan gedung negara, rumah Negara, dan bangunan umum lain nya.
  - Mewujudkan bangunan laik fungsi
- 3. Menyediakan PS-PU (prasarana dan sarana pekerjaan Umum) Dinas Pekerjaan Umum yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara adil dan merata dengan bertumpu kepada kemandirian dan kewaspadaan masyarakat serta melibatkan seluruh pelaku penyedia PS-PU (prasarana dan sarana pekerjaan Umum).
  - Strategi yang digunakan dengan memelihara dan meningkatkan kualitas jalan/jembatan, dan membangun jalan/jembatan baru.
- 4. Mendayagunakan sumber daya air secara optimal dan menjaga kelestarian sumber daya air;
  - Strategi yang digunakan dengan memelihara dan meningkatkan saluran irigasi, gorong-gorong, turap/talud/ bronjong dan membangun kanal, embung serta melaksanakan normalisasi secara periodik.
  - Pendataan terhadap sungai, banjir, & drainase di Kutai Kartanegara Rancangan strategi yang telah dibuat akan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan dan akan berpengaruh pada sistem jangka panjang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD/SKPD**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan OPD/SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 6  
Analisis Kinerja Pelayanan OPD/SKPD Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>					
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	Unit	30	30	100



Meningkatnya Kualitas Sistem Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi		<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>					
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang akan mengikuti pelatihan	Orang	150	124	82,67
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang telah dibuat	Aplikasi	1	1	100
		Pengawasan tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang tertib Pengawasan tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Badan Usaha	20	17	85
Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Kabupaten/Kota	Persentase drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Persentase	0,40	0,40	100
		<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>					
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Luas kawasan permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Ha	20,350	12,348.53	60,68
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Skunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Persentase	76	4,9	6,45
Meningkatnya Kondisi	Persentase Bangunan Negara	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>					



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Dalam Kondisi Baik	Penyelenggaraan Bangunan di Wilayah daerah kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraan penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Dokumen	100	100	100
		<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>					
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, kawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Dokumen	6	6	100
Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Persentase Meningkatnya Aksesibilitas Jalan Kabupaten	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>					
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	Km	1344,34	1344,34	100



Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan pekerjaan yang tepat sasaran;
- Kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;
- Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Terjalannya koordinasi yang baik antar bidang dalam OPD;

Permasalahan/Hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Terkendalanya pelaksanaan kegiatan oleh rekanan dalam mengefisienkan waktu, sehingga pekerjaan tidak selesai tepat waktu;
- Adanya kendala yang disebabkan oleh fenomena alam dan perubahan iklim serta curah hujan yang cukup tinggi, banjir, longsor yang berakibat terhadap percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
- Kurangnya jumlah SDM yang menguasai secara teknis pada bidang yang ditangani



### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD/SKPD**

#### **a. Tugas pokok dan fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara dan Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum.

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati, sedangkan fungsinya :

1. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Pekerjaan umum;
4. Pembinaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas;
5. Pelaksanaan urusan Kesekretariatan Dinas; dan



6. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati di bidang Pekerjaan umum. Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum relatif kurang terutama tenaga teknis yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai kebutuhan pada bidang Bina Marga, bidang Sumber Daya Air, dan bidang Cipta Karya meskipun pada saat ini sudah ada beberapa tenaga teknis yang dibutuhkan dan sebagian lagi harus lebih disesuaikan dan lebih ditingkatkan lagi. Mengingat kewajiban dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum sangat besar, sudah sewajarnya bila SDM pada dinas ini lebih diperkuat dan ditingkatkan.

c. Prasarana dan Sarana

Nilai SDM yang relatif baik tersebut tidak akan mencapai kinerja yang maksimal jika tidak ditunjang oleh **prasarana** dan **sarana** yang memadai, misalnya fasilitas IT yang cukup memadai, sarana bagi tenaga pengawas/koordinator lapangan, perencanaan banyak yang tidak lagi berupa *blue print* ataupun hardcopy, pengarsipan yang belum tertata dengan baik. Oleh karenanya sebagai organisasi penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu lebih **ditingkatkan** sehingga **kinerja** aparatur Dinas Pekerjaan Umum dapat meningkat sesuai dengan harapan yang diinginkan.

d. Sumber Dana

Disamping dari APBD Kab. Kutai Kartanegara, APBN (DAK), Bantuan Provinsi (BANKEU), dari ketiga anggaran tersebut diharapkan anggarannya tersedia karena anggaran tersebut sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa



ada dana suatu kegiatan dapat dipastikan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu rencana kinerja tahunan harus menyesuaikan dengan kemampuan APBDnya.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dan RENSTRA Pada Tahun 2024**

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD/SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja OPD/SKPD. Dan untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan sehingga capaian tujuan akhir dari setiap pelaksanaan program dapat terwujud secara sistematis, terarah dan tepat waktu.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, kemudian penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD dan atau program kegiatan cocok namun besarnya berbeda.



Tabel T-C.31.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,50		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	0		100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	300,000,000	Output kegiatan : 1. Fasilitasi Merenbang, Forum OPD 2. Penyusunan LKPD, LKJIP, LPPD 3. RKA, DPA, DLL 4. Penyusunan Sakip 5. Penyusunan PK
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan / semesteran SKPD	1 dokumen		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	persentase Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 Persen	33,885,565,759	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	352 Org	34,159,786,673	Urusan wajib
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	persentase Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100 persen	350,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	617,400,000	



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



1.03.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	50 Laporan		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					
1.03.01.2.03.02						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	2,667,752,000	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	persentase rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	100 persen	225,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	225,000,000	
1.03.01.2.03.06						Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	500,000,000	
1.03.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	350 Unit	400,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	400,000,000	



1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	persentase bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	100 persen	200,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	245 orang	2,580,000,000	1. Bimtek BIM (Building Information Modeling) 15 Orang 2. Bimtek GIS Dasar dan Terampil (70 Orang) 3. Bimtek SNI No 1 Tahun 2022 3. Ujikom PPKom (80 Orang) 4. Pelatihan Pengawasan Gedung (30 Orang) 5. Bimtek Kearsipan dan Srikandi (30 Orang) 6. Bimtek Persetujuan Bangunan Gedung(15 orang)
1.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase Administrasi umum Perangkat	100%		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			5 paket		
1.03.01.2.06.01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	200,000,000	



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1,500,000,000	1. Pengadaan dan Instalasi Lift
1.03.01.2.06.03						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	200,000,000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyediaan bahan logistik kantor	100 persen	275,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	1,000,000,000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen	100,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	200,000,000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 persen	500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	500,000,000	
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	100 persen	90,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	90,000,000	



<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	2,000,000,000	
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	100,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	250,000,000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor R	100 persen	566,879,448	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan	1,810,000,000	



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 persen	2,424,823,488	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	3,100,000,000	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Barang Milik Daerah	50 kali		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	100 persen	450,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	450,000,000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100 persen	165,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	165,000,000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER ADAYA AIR (SDA)</b>		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,8000		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER ADAYA AIR (SDA)</b>					



			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	0,0550						
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	0,0250						
<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Luas Wilayah Permukiman yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Abrasi			<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



1.03.02.2.01.01					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 dokumen	1,000,000,000	1. Penunjang 5 Kawasan Pertanian 2. Pengendali Banjir Samboja
1.03.02.2.01.02					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 dokumen	1,500,000,000	Dokumen Penyediaan Cadangan Air Baku
1.03.02.2.01.03					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 dokumen	1,500,000,000	Penunjang Pengendali Banjir Dalam Kota



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



1.03.02.2.01.04						Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten / Kota yang Disusun	1 dokumen	1,500,000,000	Penyediaan Data Sungai, Danau, Rawa, Waduk, Embung dan Pantai
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah jumlah embung dan penampung air yang dibangun	1 Unit	9,500,000,000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 unit	17,750,000,000	Penunjang Kawasan Pertanian
1.03.02.2.01.09						Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1,5 Km	6,500,000,000	Perkuatan tebing sungai untuk pencegahan longsor
1.03.02.2.01.10						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 Km	3,150,000,000	Perkuatan tebing sungai untuk pencegahan longsor
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhabilitasi	1 Unit	650,000,000	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	7 Unit	6,375,000,000	Pengendali Banjir Samboja
1.03.02.2.01.14						Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun			
1.03.02.2.01.16						Pembangunan Check Dam	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Check Dam yang dibangun	6 unit	3,3064600,000	Penunjang Pertanian/ Pengaturan sistem irigasi
1.03.02.2.01.17						Pembangunan Breakwater	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Breakwater yang Dibangun	0,4 Km	2,500,000,000	Proteksi permukiman dari gelombang



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang bangunan pengaman pantai	1500 Meter	3,000,000,000	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,6 Km	5,000,000,000	Proteksi/pengamanan garis pantai
						Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 unit	750.000.000,00	Pengendalian Banjir
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah panjang Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	27,40 Km	2,000,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	19,8 Km	25,275,000,000	Penunjang Pertanian/Pengaturan sistem irigasi dan pengendali banjir
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah OP Embung dan Penampung Air Lainnya	2 Unit	500,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	3,000,000,000	Mengembalikan kapasitas tampung waduk
1.03.02.2.01.58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah OP Check Dam	1 Unit	1,000,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Check Dam yang dioperasikan dan dipelihara	6 Unit	600,000,000	
1.03.02.2.01.65						Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Km	2,000,000,000	Menjaga fungsi sungai



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi Baik			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1 dokumen	500,000,000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	154 dokumen	4,800,000,000	Pendukung Data DAK, APBN, APBD Propinsi
1.03.02.2.02.02						Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	9,30 Km	10,000,000,000	jalan Inspeksi penunjang Kawasan Pertanian
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	3.200 Meter	4,000,000,000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	42,436035 Km	89,072,335,910	Penunjang Kawasan Pertanian
1.03.02.2.02.11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jaringan Irigasi Tambak yang ditingkatkan	1 Unit	2,500,000,000	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	2,71926 Km	2,500,000,000	Penunjang Kawasan Perikanan
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah jaringan irigasi permukaan yang direhab	10 Km	3,000,000,000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4.073,84 km	83,915,526,250	Penunjang 5 Kawasan Pertanian



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah OP Jaringan Irigasi Permukaan	11427 Meter	2,500,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	40,02 Km	23,691,400,000	Penunjang 5 Kawasan Pertanian
1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah OP Jaringan Irigasi Rawa		300,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,45 Km	300,000,000	Penunjang 5 Kawasan Pertanian
1.03.02.2.02.27						Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi yang Beroperasi	1 Unit	500,000,000	Penunjang 5 Kawasan Pertanian
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>					<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>					
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1.03.06.2.01.01						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	3 Dokumen	3,250,000,000	Dokumen Kajian Penetapan Kawasan Prioritas Penanganan Banjir



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



1.03.06.2.01.05					Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	0,377 Km	1,319,500,000	Mereduksi Banjir Kawasan Pemukiman
1.03.06.2.01.06					Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	7.600 Meter	25,543,724,600	Mereduksi Banjir Kawasan Pemukiman
1.03.06.2.01.09					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	7.220 Meter	7,525,000,000	Mereduksi Banjir Kawasan Pemukiman
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		Persentase Penataan Bangunan Gedung		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>				-	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraa n Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah bangunan negara yang laik fungsi		Penyelenggaraa n Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
1.03.08.2.01	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		jumlah data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		jumlah data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 dokumen	950,000,000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 dokumen	1,230,000,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan persentasi Pemohonan PBG untuk Investasi (penambahan intensitas Sidang PBG)</li> <li>2. Unsur Gaji TPA (Besaran berdasar perbup TPA Kab. kukar)</li> <li>3. Pelatihan Sertifikasi PTT (pelatihan spesifik tim TABG)</li> <li>4. Pelatihan ,sosialisasi oleh Dirjen Cipta Karya</li> </ol>
-----------------	--	------------------------	---	-----------	-------------	--	------------------------	--	-----------	---------------	--



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bangunan yang dapat digunakan	2 Unit	9,393,126,361	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1,160,000,000	Perubahan Regulasi nomor Rekening dari 050-3708 menjadi 050-3889 (perubahan Sub Kegiatan) 1. Tenaga Ahli Bangunan Gedung (Core Tim) 2. Penanganan Bangunan Akibat Bencana 3. Audit Internal Bangunan Gedung 4. Pengkajian Teknis Bangunan Pemerintah terhadap SLF dan PBG 5. Pendataan Pemanfaatan PBG 6. Penyusunan Database Teknis Keciptakary
-----------------	--	------------------------	--------------------------------------	--------	---------------	---	------------------------	---	-----------	---------------	--



										aan Dinas Pekerjaan Umum
1.03.08.2.01.03					Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kot a yang Disusun	2 dokumen	160,000,000	Penyusunan SHST persyaratan dasar usulan dari pusat untuk Bangunan Gedung



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



1.03.08.2.01.04					Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota		Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	900.000.000	
1.03.08.2.01.09					Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	1 unit	150,000,000.00	Urusan Wajib dan diperlukan kontrol bangunan gedung
1.03.08.2.01.13					Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	1 unit	641,980,165.00	Investigasi Usulan, Penajaman dan identifikasi Lapangan



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya					
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah bangunan dan lingkungan di kabupaten			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	1 unit	1,880,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	32 Kawasan	371,555,866,040	Penyelesaian Bangunan Gedung 1. Pasar Tangga Arung 2. Rumah Sakit Muara Badak (3. Taman Replika, Taman Palagan, RTH Sanga-Sanga 4. DED Pembangunan Kantor DLHK (Perencanaan) TAMBAHAN PAGU : 1. Depo Arsip Kabupaten 2. Rumah Sakit Muara Badak 3. DED Pembangunan



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



											nan Gedung PKB Dishub 4. LAB Dinas PU
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah bangunan dan lingkungan yang dipelihara	1 unit	500,000,000	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	16 Kawasan	59,588,167,000	Diperlukan Pemeliharaan Bangunan Gedung, Taman dan umur bangunan dan Taman diperlukan perawatan TAMBAHAN : 1. Masjid Nurul Iman Muara Kaman 2. Rehabilitasi Kantor DPU 3. Interior dan



											Meubelair Kantor DPU
	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>					<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>				<b>2,511,750,834,000</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>					<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>		Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten		<b>2,511,750,834,000</b>	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	3 Ha	1,250,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	2 dokumen	2,381.000,000	1. Review desain jembatan besi, jembatan bongkok 2. Dokumen lingkungan Muara Kaman - Muara Bengkal



1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1	luasan lahan/tanah yang dibebaskan	0,6 Ha	1,000,000,000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1	luasan lahan/tanah yang dibebaskan			
						Pengelolaan Leger Jalan	1	jumlah dokumen leger jalan			
1.03.10.2.01.04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	1	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan dan jembatan	2 dokumen	2,500,000,000	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	1	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 dokumen	2,500,000,000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	1	Panjang jalan yang dibangun	0,2 Km	1,000,000,000	Pembangunan Jalan	1	Panjang jalan yang dibangun	7,11 Km	57,688,048,530	Konektivitas antar wilayah dan penunjang fasilitas kesehatan
1.03.10.2.01.06						Pelebaran Jalan Menuju Standar		Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	3,17 Km	19.156,700,000	Pelebaran menyesuaikan fungsi jalan
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	1	Panjang jalan yang direkonstruksi	0,6 Km	2,975,000,000	Rekonstruksi Jalan	1	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	117,263 Km	536,227,017.398	1. Persentase kemandapan Jalan sebesar 64,66 % 2. Konektivitas antar wilayah, pendukung UMKM, Penunjang kawasan pertanian, pendukung pariwisata



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	1	Panjang jalan yang direhabilitasi	1 Km	9,500,000,000	Rehabilitasi Jalan	1	Panjang jalan yang direhabilitasi	13,78 Km	54,879,160,670	Konektivitas antar wilayah, Penunjang kawasan pertanian, penunjang fasilitas pendidikan
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	1	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	3 Km	7,500,000,000	Pemeliharaan Berkala Jalan	1		2 Km	5.520.000.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	2 Km	1,200,000,000	Pemeliharaan Rutin Jalan	1	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	3,67 Km	8.181,570,000	Jalan dalam kota dan jalan kabupaten dan darurat
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	1	Jumlah jembatan yang dibangun	1 Unit	3,800,000,000	Pembangunan Jembatan	1	Panjang Jembatan yang Dibangun	400 Meter	203,931.342.633	Konektivitas antar wilayah, pendukung perdagangan
						Pembangunan Jembatan Sebulu			400 M	203,931.342.633	konektivitas
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	1	Jumlah jembatan dalam kondisi runtuh dan kondisi kritis	1 Unit	13,000,000,000	Penggantian Jembatan	1	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	0,24	14.000.000,000	Konektivitas antar wilayah, pendukung pertanian, pendukung perdagangan, pendukung pariwisata
1.03.10.2.01.18						Penggantian Jembatan Oloy Rehabilitasi Jembatan		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	3.040 m	14,000,000,000 8.917.671,000	konektivitas , pariwisata Konektivitas antar wilayah, Pendukung Perdagangan



										an
						Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Muara Badak		20 m	2.325.771.000	konektivitas
						Rehabilitasi Pile Slab Jembatan Martadipura		3000 m	5.083.000.000	konektivitas
						Rehabilitasi Jembatan Salok Api Darat Menuju Salok Api laut		20 m	1.508.900.000	konektivitas
1.03.10.2.01.20						Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			Konektivitas antar wilayah, Pendukung Perdagangan
						Pemeliharaan Berkala Jembatan Kecamatan Anggana				
1.03.10.2.01.21						Penanggulangan Bencana/Tanggap darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi / Terekonstruksi Akibat Bencana			
1.03.10.2.01.22						Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 dokumen	400,000,000	



1.03.10.2.01.23						Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 dokumen	400,000,000	
						Pemeliharaan Rutin Jembatan		jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang			
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>		Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Instruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)	100%		<b>PROGRAM PENEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>					
<b>1.03.11.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>		Jumlah Tenaga Terampil Yang Akan Mengikuti Pelatihan	20 Orang		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>					
1.03.11.2.01.09	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1	Jumlah SDM trainer yang sudah lulus seleksi	20 Orang	300,000,000	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	30 dokumen	300,000,000	



1.03.11.2.01.12	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	1	jumlah Intstruktur/Asesor /Penyelenggara	10 orang	300,000,000	PenyediaanInstruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1	Jumlah Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	30 Orang	300,000,000	
1.03.11.2.01.16			jumlah tenaga terampil yang mengikuti pelatihan	200 Orang		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	200 Orang	500,000,000	
<b>1.03.11.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Telah Dibuat	3 Aplikasi		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1.03.11.2.02.012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1	jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Buah	150,000,000	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2 dokumen	150,000,000	
1.03.11.2.02.013	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1	jumlah Tenaga Kerja dan Badan Usaha	2 orang	100,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang	1 dokumen	100,000,000	



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



								Disediakan				
1.03.11.2.02.015			jumlah Layanan Informasi yang dikelola			Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1	Jumlah LaporanOperasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2 laporan	150,000,000		
1.03.11.2.04	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>		Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Tertib Pengawasan, Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 perusahaan		<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>						
1.03.11.2.04.008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Buah	100,000,000	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan , dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	1	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 dokumen	100,000,000		
<b>Total Pendanaan (Paket):</b>							0					
<b>Total Pendanaan:</b>						126,680,395,056					1.738.207.408.704	



## **2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD/SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD/SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD/SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten (bila sudah dilakukan).

Sehingga semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif dan akan langsung diteruskan ke masing-masing OPD/SKPD yang terkait dan akan di temukan di dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan yang akan melibatkan seluruh Stake Holder Pemerintahan dalam menentukan program-program prioritas pembangunan kedepannya.

Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 sebagai berikut :



Tabel T-C.32.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perlunya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	300,000,000.00
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perlunya pembayaran gaji ASN yang tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	352 Orang	34,159,786,673.00
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Perlunya proses verifikasi/pengujian atas dokumen pembayaran	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	617,400,000.00



**Rencana Kerja (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

2024



4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Perlunya pengamanan atas Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	2,667,752,000.00
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Perlunya penyusunan laporan BMD pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	225,000,000.00
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Perlunya penatausahaan laporan BMD pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	500,000,000.00
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Perlunya pengadaan pakaian dinas ASN pada SKPD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	350 Paket	400,000,000.00
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Perlunya bimbingan teknis atas Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	600,000,000.00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perlunya penyediaan komponen Instalasi Listrik atas Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	200,000,000.00



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlunya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	10,000,000,000.00
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perlunya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	200,000,000.00
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perlunya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	1,000,000,000.00
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pewrlunya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200,000,000.00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perlunya me;akukan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	500,000,000.00
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Perlunya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	500,000,000.00
16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlunya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6,500,000,000.00



**Rencana Kerja (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA** 2024



17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perlunya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	250,000,000.00
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlunya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	3,310,000,000.00
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perlunya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	6,350,000,000.00
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perlunya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	450,000,000.00
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perlunya dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	165,000,000.00



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



22	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	86,5 Km	86,750,000,000.00
23	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	50 Km	50,000,000,000.00
24	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Normalisasi/Restorasi Sungai	Kutai Kartanegara	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	76,42 Km	116,262,240,000.00
25	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kutai Kartanegara	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	8,75 Km	51,200,000,000.00
26	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kutai Kartanegara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	25,000,000,000.00



27	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Tanggul Sungai	Kutai Kartanegara	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	6,5 Km	9,000,000,000.00
28	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kutai Kartanegara	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	2,5 Km	12,000,000,000.00
29	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kutai Kartanegara	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	10	1,200,000,000.00
30	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen	1,500,000,000.00
31	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Kutai Kartanegara	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	3 Unit	63,000,000,000.00



**Rencana Kerja (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

2024



32	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kutai Kartanegara	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	2,2 Km	42,500,000,000.00
33	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Kutai Kartanegara	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Km	2,500,000,000.00
34	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kutai Kartanegara	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	8.75	51,200,000,000.00
35	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kutai Kartanegara	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Km	1,900,000,000.00
36	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kutai Kartanegara	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	18 Titik	3,600,000,000.00



37	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Operasi dan Pemeliharaan Danau	Kutai Kartanegara	Jumlah Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dipelihara	1450 Ha	57,000,000,000.00
38	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kutai Kartanegara	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	1,52 Km	1,000,000,000.00
39	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rehabilitasi Check Dam	Kutai Kartanegara	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	1 Unit	500,000,000.00
40	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Belum optimalnya bangunan madatori spending dan masjid besar kabupaten	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kutai Kartanegara	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	5	Usulan Musrenbang
41	Pembangunan Jembatan Sebulu		Pembangunan Jembatan	Sebulu	Panjang Jembatan yang dibangun	450 Meter	1.000.000.000.000,00
42	Pembangunan Jembatan Loa Kulu		Pembangunan Jembatan	Loa Kulu	Panjang Jembatan yang dibangun	450 Meter	1.000.000.000.000,00
43	Penggantian Jembatan Kutai Lama		Penggantian Jembatan	Anggana	Panjang Jembatan yang dilakukan Penggantian	24 Meter	16.000.000.000,00
44	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kukar	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	450 Meter	1.000.000.000,00



45	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Perlunya Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dikarenakan ada peraturan tentang pengawasan	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30 Orang	100.000.000,00
46	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Perlunya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi di lingkup kutai kartanegara	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 dokumen	200.000.000,00
47	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Perlunya data dan informasi tentang material & peralatan di kukar	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Kab. Kutai Kartanegara	tersedianya data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	1 dokumen	100.000.000,00
48	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	untuk mendukung layanan SIPJAKI	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 dokumen	350.000.000,00
49	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	untuk meningkatkan SDM administrator SIPJAKI	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Administrator SIPJAKI yang telah dilatih & ditingkatkan	5 Orang	100.000.000,00



50	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	untuk meningkatkan SDM bidang urusan jasa konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah kelembagaan konstruksi yang telah dibina & ditingkatkan	80 Orang	200.000.000,00
51	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	untuk memantau pekerja yang telah melaksanakan pelatihan, apakah sudah bekerja atau belum	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah tenaga terampil yang telah dipantau dan dievaluasi	1 dokumen	100.000.000,00
52	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil di kukar	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah tenaga terampil yang mengikuti pelatihan	300 Orang	1.500.000.000,00



### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum**

Ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar-kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara, penyelenggaraan otonomi daerah, perubahan iklim dan efisiensi aparat Dinas Pekerjaan Umum adalah isu strategis utama yang menjadi perhatian di dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum. Ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar-kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendorong tingginya arus urbanisasi menuju daerah perkotaan. Sudah sama-sama dipahami bahwa kota adalah mesin pertumbuhan ekonomi sehingga proses pengembangan wilayah terjadi karena adanya perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kemudian diikuti dengan penyebaran pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Sehingga sudah menjadi wajar apabila daerah-daerah perkotaan selalu memiliki daya tarik yang kuat bagi penduduk yang berada di luar kota tersebut. Dinas Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 237 desa/kelurahan. Dengan pertumbuhan penduduk 3,92% per tahun, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 645.817 jiwa (2014) dengan kepadatan penduduk rata-rata 24 jiwa/km<sup>2</sup> (sumber KutaiKartanegara.com).

Tingkat urbanisasi yang tinggi ini belum disertai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun kesenjangan antara rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan (backlog) yang telah ada sebelumnya. Demikian juga ketersediaan infrastruktur belum merata dan menjangkau



semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dari sisi otonomi daerah, sejak bergulirnya pada tahun 1998, hingga saat ini. Melalui otonomi, pemerintahan daerah memiliki keleluasan yang lebih luas dalam mengelola daerahnya sendiri, namun kemampuan daerah untuk melakukan pengelolaannya tidaklah merata pada semua daerah. Ada daerah yang memiliki kemampuan yang sudah sangat baik dan memadai dalam mengelola daerahnya, namun masih banyak daerah yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang sangat rendah dalam pengelolaan daerahnya. Hal ini membawa masalah tersendiri, terutama bagi daerah-daerah yang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengembangkan daerahnya.

Menghadapi tantangan tersebut, perlu pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan yang terencana secara matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efektif dan efisien.

Beranjak pada isu yang mulai merebak hangat di kalangan dunia internasional, yaitu isu pemanasan global dan perubahan iklim, pola pembangunan pekerjaan umum dan permukiman juga dihadapkan pada tuntutan untuk mengurangi semaksimal mungkin dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut, seperti emisi gas rumah kaca dan kegiatan yang mendorong deforestasi.

Dari sisi internal Dinas Pekerjaan Umum, kapasitas dan kemampuan institusi ke-PU-an haruslah ditingkatkan dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan



akuntabel. Untuk itu pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan good government haruslah terus dilaksanakan di lingkungan instansi ke-PU-an di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penggalian isu strategis tidak bisa lepas dari kerangka acuan perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, tahun 2022-2026 merupakan periode RPJMD keempat dimana mengusung visi Terwujudnya Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia.

Berdasarkan Arah pembangunan periode RPJMD yang menjadi titik berat yaitu :

1. Menuju masyarakat Kutai Kartanegara yang SEJAHTERA dan BAHAGIA
2. Dukungan persiapan pembangunan IKN
3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia
4. Penataan infrastruktur daerah yang terintegrasi antara spasial dan fungsional
5. Pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan
6. Percepatan pembangunan wilayah desa dan kecamatan

Frase utama arah pembangunan periode RPJMD tersebut kemudian dirumuskan menjadi tema pembangunan. Tema-tema tersebut digunakan untuk lebih memudahkan dalam rangka penggalian permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam rangka penyusunan bahan kebijakan perencanaan bagi kepala daerah melalui visi dan misinya.

Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang



- berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
  4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
  5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi 6 aspek, yaitu ;

- a) Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
- b) Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisikpotensi ekonomi dan budaya lokal;
- c) Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi;
- d) Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis;



- e) Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana;
- f) Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; dan peningkatan kapasitas keuangan daerah;

### **3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan RENJA OPD**

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026, maka Dinas Pekerjaan Umum merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dan tercapainya misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tujuan Pekerjaan Umum jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar

Dengan sasaran pembangunan infrastruktur jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Aksebilitas Jalan Kabupaten
2. Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik
3. Meningkatkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi
4. Meningkatnya kualitas layanan irigasi & penanganan banjir

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Untuk tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai 6 Program 18 Kegiatan dan 86 Sub kegiatan yang dapat dilihat dlm tabel berikut :



**Tabel T-C.33  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75									
1	03	01	2	01									
	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												
1	03	01	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	300,000,000.00	APBD		5 Laporan	300,000,000.00



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



1	03	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
1	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	352 Org	34,159,786,673.00	APBD		352 Org	34,159,786,673.00
1	03	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	617,400,000.00	APBD		2500 Dokumen	617,400,000.00
1	03	01	2	03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							
1	03	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	2,667,752,000.00	APBD		5 dokumen	2,667,752,000.00
1	03	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	225,000,000.00	APBD		1 Laporan	225,000,000.00
1	03	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	500,000,000.00	APBD		8 Laporan	500,000,000.00
1	03	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				APBD			
1	03	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	350 paket	400,000,000.00	APBD		350 paket	400,000,000.00
1	03	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 orang	600,000,000.00	APBD		65 orang	600,000,000.00



**Rencana Kerja (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



1	03	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
1	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	200,000,000.00	APBD		2 paket	200,000,000.00
1	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	10,000,000,000.00	APBD		7 paket	10,000,000,000.00
1	03	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	200,000,000.00	APBD		1 paket	200,000,000.00
1	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	1,000,000,000.00	APBD		7 paket	1,000,000,000.00
1	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	200,000,000.00	APBD		2 paket	200,000,000.00
1	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	500,000,000.00	APBD		100 Laporan	500,000,000.00
1	03	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	500,000,000.00	APBD		2 dokumen	500,000,000.00
1	03	01	2	07		<b>Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
1	03	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6,500,000,000.00	APBD		5 Unit	6,500,000,000.00



**Rencana Kerja (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

2024



1	03	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-				-
1	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	250,000,000.00	APBD		3 Laporan	250,000,000.00
1	03	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	3,310,000,000.00			10 Laporan	3,310,000,000.00
1	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	6,350,000,000.00	APBD		3 Laporan	6,350,000,000.00
1	03	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
1	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	450,000,000.00	APBD		4 Unit	450,000,000.00
1	03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	165,000,000.00	APBD		1 Unit	165,000,000.00



						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER ADAYA AIR (SDA)							
1	03	02	2	01		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							
1	03	02	2	01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	5 dokumen	5,600,000,000.00	APBD		5 dokumen	5,600,000,000.00
1	03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 dokumen	1,500,000,000.00	APBD		1 dokumen	1,500,000,000.00
1	03	02	2	01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	5 dokumen	5,400,000,000.00	APBD		2 Dokumen	1,500,000,000.00



**Rencana Kerja (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



1	03	02	2	01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1,500,000,000.00	APBD		1 dokumen	1,500,000,000.00
1	03	02	2	01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	5 unit	25,750,000,000.00	APBD		1 Unit	25,000,000,000.00
1	03	02	2	01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun					18 Titik	3,600,000,000.00
1	03	02	2	01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1,5 Km	6,500,000,000.00	APBD		2 Km	5,000,000,000.00
1	03	02	2	01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 Km	3,150,000,000.00	APBD		2,5 Km	12,000,000,000.00
1	03	02	2	01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	2 Unit	4,125,000,000.00	APBD		10 Unit	1,200,000,000.00
1	03	02	2	01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	1 unit	10,000,000,000.00	APBD		3 Unit	63,000,000,000.00
1	03	02	2	01	16	Pembangunan Check Dam	jumlah Check Dam yang dibangun	4 unit	2,250,000,000.00	APBD		4 unit	2,250,000,000.00
1	03	02	2	01	17	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	0,4 Km	2,500,000,000.00	APBD		0,4 Km	2,500,000,000.00
1	03	02	2	01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,6 Km	5,000,000,000.00	APBD		2,2 Km	42,500,000,000.00
1	03	02	2	01	01	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi				Kutai Kartanegara	1 Unit	500,000,000.00



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



1	03	02	2	01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	24,5 Km	27,250,000,000.00	APBD		76,42 Km	116,262,240,000.00
1	03	02	2	01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	3,000,000,000.00	APBD		2 Unit	3,000,000,000.00
1	03	02	2	01	58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang dioperasikan dan dipelihara	6 Unit	600,000,000.00	APBD		6 Unit	600,000,000.00
1	03	02	2	01	64	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dipelihara					1450 Ha	57,000,000,000.00
1	03	02	2	01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Km	2,000,000,000.00	APBD		4 Km	2,500,000,000.00
1	03	02	2	02		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							
1	03	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	160 dokumen	5,550,000,000.00	APBD		160 dokumen	5,550,000,000.00
1	03	02	2	02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	9,30 Km	10,000,000,000.00	APBD		9,30 Km	10,000,000,000.00



1	03	02	2	02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	446,793 Km	122,200,000,000.00	APBD		446,793 Km	122,200,000,000.00
1	03	02	2	02	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	2,71926 Km	2,500,000,000.00	APBD		2,71926 Km	2,500,000,000.00
1	03	02	2	02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	74,91 Km	97,915,526,250.00	APBD		86,5 Km	86,750,000,000.00
1	03	02	2	02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	50,02 Km	26,691,400,000.00	APBD		50 Km	50,000,000,000.00
1	03	02	2	02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,45 Km	300,000,000.00	APBD		0,45 Km	300,000,000.00
1	03	02	2	02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	1 Unit	500,000,000.00	APBD		1 Unit	500,000,000.00
						<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>							
1	03	06	2	01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							
1	03	06	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	4 Unit	3,250,000,000.00	APBD		4 Unit	3,250,000,000.00
1	03	06	2	01	05	Pembangunan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Perkotaan	377 Meter	1,319,500,000.00	APBD		1,52 Km	1,000,000,000.00



**Rencana Kerja (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**2024**



						Perkotaan	yang Dibangun							
1	03	06	2	01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		2.300 Meter	13,635,000,000.00	APBD		8,75 Km	51,200,000,000.00
1	03	06	2	01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara		12.220 Meter	7,525,000,000.00	APBD		3 Km	1,900,000,000.00
						<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase Penataan Bangunan Gedung							
1	03	07	2	01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	jumlah data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG							
1	03	07	2	01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	jumlah data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kutai Kartanegara	1	1,230,000,000.00	APBD Kab. Kutai Kartanegara	Urusan Wajib	2	2,402,000,000.00



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



1	03	07	2	01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bangunan negara yang laik fungsi	Kutai Kartanegara	7	4,570,450,000.00	APBD Kab. Kutai Kartanegara		9	7,620,647,000.00
1	03	07	2	01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Terkait Regulasi Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	2	160,000,000.00	APBD Kab. Kutai Kartanegara	Urusan Wajib	2	360,000,000.00
1	03	07	2	01	09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Dokumen terkait pengawasan dan pengendalian bangunan gedung	Kutai Kartanegara	1	150,000,000.00	APBD Kab. Kutai Kartanegara	Urusan Wajib	1	550,000,000.00
1	03	07	2	01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang dipelihara / dirawat	Kutai Kartanegara	1	641,980,165.00	APBD Kab. Kutai Kartanegara		1	900,000,000.00
						<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya							
1	03	09	2	01		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah bangunan dan lingkungan di kabupaten							
1	03	09	2	01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	Kutai Kartanegara	32	577.353.566.420,00	APBD Kab. Kutai Kartanegara		29	490.023.819.624,00
1	03	09	2	01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	jumlah bangunan dan lingkungan yang dipelihara	Kutai Kartanegara	5	74,251,403,500.00	APBD Kab. Kutai Kartanegara		13	95,751,393,843.00
						<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>								



**Rencana Kerja (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



1	03	10	2	01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>								
1	03	10	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian		2	1,350,000,000.00	APBD		2	1,350,000,000.00
1	03	10	2	01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan				-	APBD			-
1	03	10	2	01	04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan dan jembatan		2	2,500,000,000.00	APBD		2	2,500,000,000.00
1	03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun		7.74	72,372,598,000.00	APBD		7.74	72,372,598,000.00
1	03	10	2	01	06	Pelebaran Jalan menuju standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar		2.17	15,156,700,000.00	APBD		2.17	15,156,700,000.00
1	03	10	2	01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		119	813,293,114,997.00	APBD		119	813,293,114,997.00
1	03	10	2	01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi		24.46	147,446,887,000.00	APBD		24.46	147,446,887,000.00
1	03	10	2	01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara Berkala		12.03	59,932,561,000.00	APBD		12.03	59,932,561,000.00
1	03	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara Rutin		3.67	5,500,000,000.00	APBD		3.67	5,500,000,000.00



**Rencana Kerja (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**2024**



1	03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	346.7	75,129,295,000.00	APBD	346.7	75,129,295,000.00
1	03	10	2	01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan Penggantian	3.96	172,380,513,000.00	APBD	3.96	172,380,513,000.00
1	03	10	2	01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	4	34,243,442,000.00	APBD	4	34,243,442,000.00
1	03	10	2	01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	0.15	4,225,476,000.00	APBD	0.15	4,225,476,000.00
1	03	10	2	01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	3	4,000,000,000.00	APBD	3	4,000,000,000.00
1	03	10	2	01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1	400,000,000.00	APBD	1	400,000,000.00
1	03	10	2	01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1	400,000,000.00	APBD	1	400,000,000.00
						<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Instruktur dan Tenaga Terampil/ Ahli)</b>					
1	03	11	2	01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Jumlah Tenaga Terampil yang akan mengikuti pelatihan					



**Rencana Kerja (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**2024**



1	03	11	2	01	01	Sub Kegiatan Penyiapan Training Need Assesment ( TNA ) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM trainer yang sudah lulus seleksi		1 dokumen	300,000,000.00	APBD	APBD	1 dokumen	300,000,000.00
1	03	11	2	01	02	Sub Kegiatan Penyiapan Instruktur/Asesor/Pe nyelenggara Pelatihan	jumlah Intsruktur/Asesor/Pe nyelenggara		1 dokumen	300,000,000.00	APBD	APBD	1 dokumen	300,000,000.00
1	03	11	2	01	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	jumlah tenaga terampil yang mengikuti pelatihan		200 Orang	500,000,000.00	APBD	APBD	600 Orang	2,000,000,000.00
1	03	11	2	01	07	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	jumlah kelembagaan konstruksi yang telah dibina & ditingkatkan					APBD	80 Orang	200,000,000.00
1	03	11	2	01	08	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	jumlah tenaga terampil yang telah dipantau dan dievaluasi					APBD	1 dokumen	100,000,000.00
1	03	11	2	02		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang telah buat</b>							
1	03	11	2	02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	jumlah Layanan Informasi yang dikelola		1 dokumen	150,000,000.00	APBD	APBD	1 dokumen	150,000,000.00



**Rencana Kerja (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

2024



1	03	11	2	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		1 dokumen	150,000,000.00	APBD	APBD	1 dokumen	150,000,000.00
1	03	11	2	02	06	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	jumlah Tenaga Kerja dan Badan Usaha		1 dokumen	100,000,000.00	APBD	APBD	1 dokumen	100,000,000.00
						<b>Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI</b>	<b>jumlah Administrator SIPJAKI yang telah dilatih &amp; ditingkatkan</b>					APBD	5 Orang	100,000,000.00
1	03	11	2	04		<b>Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang tertib Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>							
1	03	11	2	04	01	Sub Kegiatan Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1	100,000,000.00	APBD	APBD	1 dokumen	100,000,000.00



**Rencana Kerja (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**2024**



1	03	11	2	04	02	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	jumlah Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					1 dokumen	100,000,000.00
1	03	11	2	04	03	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	jumlah Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					1 dokumen	200,000,000.00



## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1 Program dan Kegiatan

A. Program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum tahun 2024 terdiri atas :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	3	4	5	6	7	8
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75			
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan	300,000,000.00	APBD	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		352 Org	34,159,786,673.00	APBD	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2500 Dokumen	617,400,000.00	APBD	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		5 dokumen	2,667,752,000.00	APBD	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	225,000,000.00	APBD	



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		8 Laporan	500,000,000.00	APBD	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					APBD	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		350 paket	400,000,000.00	APBD	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		245 orang	2.580,000,000.00	APBD	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	200,000,000.00	APBD	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	1.500,000,000.00	APBD	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	200,000,000.00	APBD	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 paket	1,000,000,000.00	APBD	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	200,000,000.00	APBD	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	500,000,000.00	APBD	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2 dokumen	90,000,000.00	APBD	
<b>Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1Unit	2,000,000,000.00	APBD	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	250,000,000.00	APBD	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		9 Laporan	1,810,000,000.00		



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		8 Laporan	3,100,000,000.00	APBD	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 Unit	450,000,000.00	APBD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	165,000,000.00	APBD	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER ADAYA AIR (SDA)</b>						
<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		1 dokumen	1,000,000,000.00	APBD	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun		1 dokumen	1,500,000,000.00	APBD	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		1 dokumen	1,500,000,000.00	APBD	Pemutakhiran SIPD



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		1 dokumen	1,500,000,000.00	APBD	
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		3 unit	17,750,000,000.00	APBD	
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun					
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun		1,5 Km	6,500,000,000.00	APBD	
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		1 Km	3,150,000,000.00	APBD	
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun		7 Unit	6,375,000,000.00	APBD	
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				APBD	
Pembangunan Check Dam	jumlah Check Dam yang dibangun		6 unit	3,306.460,000.00	APBD	
Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun		0,4 Km	2,500,000,000.00	APBD	
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		0,6 Km	5,000,000,000.00	APBD	
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Kutai Kartanegara	1 Unit	750.000.000,00	APBD	-
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		19,8 Km	25,275,000,000.00	APBD	
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		2 Unit	3,000,000,000.00	APBD	
Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang dioperasikan dan dipelihara		6 Unit	600,000,000.00	APBD	
Operasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dipelihara					
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara		2 Km	2,000,000,000.00	APBD	
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		154 dokumen	4,800,000,000.00	APBD	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		9,30 Km	10,000,000,000.00	APBD	
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		42,436035 Km	89,072.335,910.00	APBD	
Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan		2,71926 Km	2,500,000,000.00	APBD	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		4073,84 Km	83.915,526,250.00	APBD	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		40,02 Km	23,691,400,000.00	APBD	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara		0,45 Km	300,000,000.00	APBD	
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi yang Beroperasi		1 Unit	500,000,000.00	APBD	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>						
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun		3 Unit	3,250,000,000.00	APBD	
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun		377 Meter	1,319,500,000.00	APBD	
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		7.600 Meter	25,534,724,600.00	APBD	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara		10.220 Meter	7,525,000,000.00	APBD	
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>						
	Persentase Penataan Bangunan Gedung					



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	jumlah data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG					
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kutai Kartanegara	100 dokumen	1,230,000,000.00	APBD Kab. Kutai Kartanegara	Urusan Wajib
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	3 dokumen	1,160,000,000.00	APBD Kab. Kutai Kartanegara	
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Kutai Kartanegara	2 dokumen	160,000,000.00	APBD Kab. Kutai Kartanegara	Urusan Wajib
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	1 dokumen	900,000,000.00	APBD Kab. Kutai Kartanegara	Urusan Wajib
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan		1 unit	150.000.000,00	APBD	



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Kutai Kartanegara	1	641,980,165.00	APBD Kab. Kutai Kartanegara	
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya					
<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah bangunan dan lingkungan di kabupaten					
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kutai Kartanegara	32 kawasan	371.555.866.040,00	APBD Kab. Kutai Kartanegara	
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>						
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kutai Kartanegara	16 kawasan	59.588,167,000.00	APBD Kab. Kutai Kartanegara	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan		64,66			
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten		1.418,03 km			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian		2 dokumen	2,381,000,000.00	APBD	



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan				-	APBD	
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan dan jembatan		2 dokumen	2,500,000,000.00	APBD	
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun		7.11 km	57,688,084.350.00	APBD	
Pelebaran Jalan menuju standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar		3.17 km	19,156,700,000.00	APBD	
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		117,263 km	536,277,017,398.00	APBD	
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi		13,78 km	54,879.160,670.00	APBD	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara Berkala		2 km	5,520,000,000.00	APBD	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara Rutin		3.67 km	8.181.570,000.00	APBD	
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun		400 m	203.931.342.633.00	APBD	
Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan Penggantian		0,24 km	14,000,000,000.00	APBD	
Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan Rehabilitasi		3.040 m	8.917.671.000.00	APBD	
Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala					
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana					
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		1 dokumen	400,000,000.00	APBD	
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		1 dokumen	400,000,000.00	APBD	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Instruktur dan Tenaga Terampil/ Ahli)</b>					
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Jumlah Tenaga Terampil yang akan mengikuti pelatihan					



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan		30 dokumen	300,000,000.00	APBD	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan		30 orang	300,000,000.00	APBD	APBD
Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan		200 Orang	500,000,000.00	APBD	APBD
Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	jumlah kelembagaan konstruksi yang telah dibina & ditingkatkan					APBD
Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	jumlah tenaga terampil yang telah dipantau dan dievaluasi					APBD
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang telah buat</b>					
Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		2 dokumen	150,000,000.00	APBD	APBD
Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi		2 laporan	150,000,000.00	APBD	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		1 dokumen	100,000,000.00	APBD	APBD
<b>Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI</b>	<b>jumlah Administrator SIPJAKI yang telah dilatih &amp; ditingkatkan</b>					APBD



# Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024



<b>Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang tertib Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>					
Sub Kegiatan Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 dokumen	100,000,000.00	APBD	APBD
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	jumlah Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					



## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan kebinamargaan yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga RENJA tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu ) tahun. Renja SKPD disusun dengan mempedomani



Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2024 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian diharapkan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara akan terlaksana dengan upaya meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 khususnya dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut :

- a. Sinergi Regulasi : diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sehingga



dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKP tahun berjalan dalam koridor RPJMN Tahun 2022-2026 . selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman , kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

- b. Sinergi Perencanaan : dalam tahap perencanaan, RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 harus bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan dalam pelaksanaan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintah (Kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar pusat dan daerah.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka diperlukan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan dan usulan dari kelurahan dan kecamatan serta usulan dari



Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi.

## **5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbitnya permendagri No. 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sebagai berikut :

1. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri No. 54 tahun 2010 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kalimantan Timur, maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya, diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renstra Dinas).



### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang
3. Menerapkan system reward and punishment terhadap seluruh pegawai untuk peningkatan kinerja pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud;
6. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila mengacu pada jadwal yang ditetapkan.
7. Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.



**Rencana Kerja (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

2024



Demikian Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

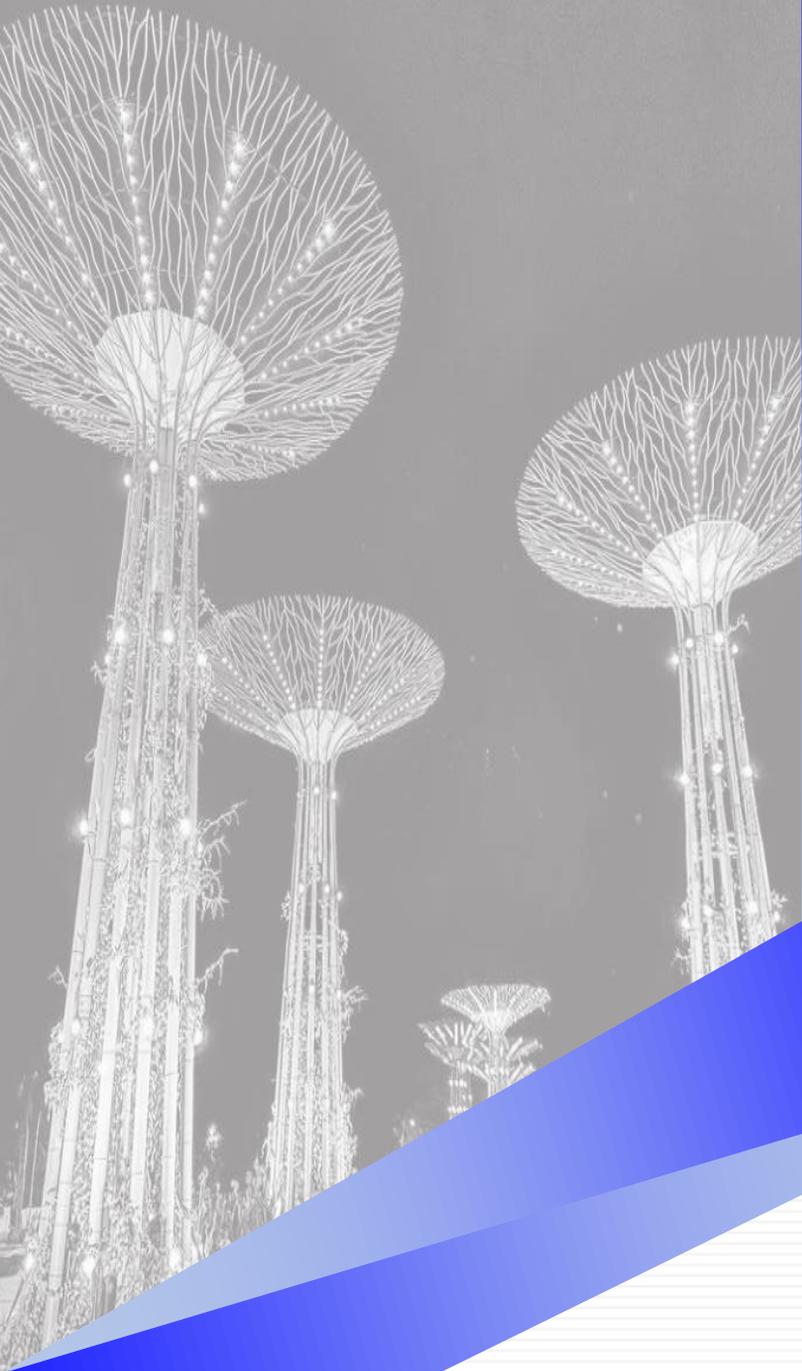
Tenggarong, 29 Juni 2023

KEPALA,

**WISNUWARDHANA, ST.,MT.**

Pembina Tk. I

NIP .197110242000121001



**Alamat Kantor**

**Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati  
Kutai Kartanegara 75511**

**Email : [dpu@mail.kukarkab.go.id](mailto:dpu@mail.kukarkab.go.id), Website :**

**<http://www.dpukukar.com>**